KESADARAN POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA EELAHAJI KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA PADA TAHUN 2017

¹ Eka Suaib, ²Asriani, ³Rahimudin

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

e-mail correspondence: asrianifisip@gmail.com

Kendari - Sulawesi Tenggara - Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to identify and find out how the political awareness of the community in the Eelahaji Village Head Election 2017. This study used a qualitative method, with data obtained from observations, interviews, and field documentation where the informants were determined by purposive sampling and using interactive data analysis methods. Miles and Huberman. The results showed that in terms of the knowledge of the voters of Eelahaji Village about politics, they tended to be enthusiastic about participating in the general election for the village head but only followed other people and did not know the importance of politics and the rules of the game in organizing elections. In terms of understanding politics, it shows the low understanding of the voting community about politics due to the lack of people's willingness to know more about politics and the lack of the role of local government in providing education about politics. In terms of attitudes towards political phenomena, there is a tendency for people to continue to accept the existence of Money Politics and even view political phenomena as commonplace. Meanwhile, in terms of behavior patterns, it appears that the community tends to obey all government directives. In addition, there was also a phenomenon of polarization among the people of Eelahaji Village during the Pilkades.

Keywords: *Political Awareness; Village Head Elections*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana kesadaran politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Eelahaji 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan dimana para informan ditentukan secara purposive sampling dan menggunakan metode analisis data interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi pengetahuan masyarakat pemilih Desa Eelahaji mengenai politik, mereka cenderung antusias untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala desa tersebut namun hanya mengikuti masyarakat yang lain dan belum mengetahui pentingnya berpolitik serta aturan main dalam penyelenggaraan pemilu. Dari segi pemahaman mengenai politik menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat pemilih tentang politik yang disebabkan kurangnya kemauan masyarakat sendiri untuk mengenal politik lebih jauh dan kurangnya peran pemerintah setempat dalam memberikan edukasi tentang politik. Dari segi sikap terhadap fenomena politik adanya kecenderungan masyarakat untuk tetap menerima adanya Money Politik dan bahkan memandang fenomena politik sebagai hal yang lumrah terjadi. Sementara dari segi pola perilaku nampak masyarakat cenderung patuh mengikuti segala arahan pemerintah. Selain itu, juga terlihat adanya fenomena polarisasi di tengah masyarakat Desa Eelahaji selama penyelenggaraan pilkades.

Kata Kunci: *Kesadaran Politik; Pemilu Kepala Desa*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa sarana pelaksanaan azas kedaulatan rakyat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepala desa sebagai pemimpin formal di desa harus dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Sifat demokrasi harus ada dan dipertahankan, bukan semata-mata, karena sendi kehidupan demokratis dapat menjamin terselenggaranya pembangunan desa, akan tetapi pembangunan desa memerlukan dukungan dari masyarakat. Konsep pembangunan desa sebenarnya tidak dikenal dalam literature pembangunan. Pembangunan desa merupakan kreasi dan ikon Orde Baru, yang muncul pada Pelita I (1969-1974) yang melahirkan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa di Departemen Dalam Negeri.

Menurut Wasistiono (2006) tentang pemilihan kepala desa menyatakan bahwa apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat. Pemilihan kepala desa merupakan kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaan masyarakat desa. Pemilihan kepala desa dilakukan dalam enam tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 39 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi: Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Wujud dari kesadaran politik salah satu bentuknya adalah partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketatatan kebijakan penguasa. Maka dari itu terciptalah *social control* yang berasal dari *people power* yang cerdas dan bermoral. Dari masyarakat seperti ini akan lahir pemimpin yang amanah untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai sejahtera.

Pengalaman pemilihan kepala desa yang berlangsung dalam beberapa decade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran diatas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran politik dan kepercayaan sangat rendah maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Jumlah wajib pilih pada pemilihan kepala desa di Desa Eelahaji pada tahun 2017 yang lalu berjumlah 503 orang

Tabel1. Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2017

Masyarakat yang memilih	Masyarakat yang tidak memilih
471	32
87%	13%

Sumber: dari panitia pemilihan 2017

Tabel 1 menjelaskan bahwa Jika melihat jumlah pemilih pada pemilihan kepala desa tahun 2017 bulan mei tanggal 7, menurut Naharudin panitia pemilihan mengatakan jumlah pemilih dalam pilkades kali ini 471 Sedangkan warga yang tidak hadir/tidak memilih 32 Itu berarti 87% partisipasi politik masyarakat yang memilih dalam pemilihan kepala desa. Sedangkan 13% masyarakat yang tidak memilih dalam pemilihan kepala desa di Desa Eelahaji pada bulan mei 2017.

Berdasarkan penjelasan diatas tingkat kesadaran politik masyarakat cenderung aktif. Artinya dengan adanya pemilihan kepala desa di desa Eelahaji masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Pertimbangan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian ini terdapat hal-hal yang layak diteliti di Desa Eelahaji yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2017 dimana kesadaran akan haknya memilih diadipilih sebagai warga Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu. Penelitian tentang Kesadaran Politik Masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa Eelahaji Kecamatan kulisusu kabupaten buton utara pada tahun 2017 ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang ada dalam penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Panitia pemilihan kepala desa 2017 yang berjumlah 5 orang dan masyarakat pemilih 5 orang. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2010 :137). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dekriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk kualitatif dan diberikan penjelasan-penjelasan ataupun kesimpulan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berupa wawancara atau kalimat yang dapat memberikan gambaran di lapangan tentang kesadaran politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di desa eelahaji kecamatan kulisusu kabupaten buton utara, karena menyadari adanya keterbatasan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Widjaja (2014: 165) menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "*Development Community*" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "*Independent Community*" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut:

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada "kemurahan hati" pemerintah dapat semakin berkurang.
2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

A. Pemilihan Kepala Desa Eelahaji Tahun 2017**1. Tahapan- tahapan dalam pemilihan Kepala desa****a. Tahap persiapan**

- 1) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan
- 2) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban anggaran pendapatan dan belanja desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak panitia terbentuk
- 3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan
- 4) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia dalam jangka waktu 15 hari
- 5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kelengkapannya seperti: SKCK polisi, Bebas narkoba, Pendidikan minimal SLTP/ sederajat, Tidak menjadi pengurus Partai.
- 6) Penyetoran berkas ke panitia
- 7) Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 orang calon dan paling banyak 4 orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa
- 8) Masa kampanye
- 9) Masa tenang

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan
- 2) Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa Melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- 3) Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa
- 4) Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa, dan

c. Tahap Pelaporan

- 1) Pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 hari Setelah musyawarah desa mengesahkan calon kepala desa terpilih

- 2) Pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan
- 3) Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 hari sejak diterimanya laporan dari BPD. dan
- 4) Pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Calon Kepala Desa dan Perolehan suara masing-masing calon

Tabel 2. Daftar Calon dan Perolehan suara Pilkades Desa Eelahaji 2017

Nama Calon	Suara Sah	Tidak Sah
Abzar	174	10
Ahmat Barik	2	0
Darman	132	6
Zuhamudin	163	16
Total	471	32

Sumber: panitia pemilihan kepala desa

Berdasarkan tabel 2, suara terbanyak pertama diperoleh Abzar dengan suara sah sebanyak 174 suara dan tidak sah sebanyak 10 suara. Disusul suara terbanyak kedua oleh Zuhamudin dengan suara sah sebanyak 163 suara dan tidak sah sebanyak 16 suara. Suara terbanyak ketiga yaitu Darman dengan suara sah sebanyak 132 suara dan tidak sah sebanyak 6 suara. dan suara terkecil oleh Ahmat Barik dengan suara sah sebanyak 2 suara dan tidak sah 0 suara. Kesimpulan yang menjadi Kepala desa terpilih adalah Abzar dengan total 174 suara.

B. Kesadaran Politik Masyarakat Dalam Pilkades Desa Eelahaji 2017

Berkaitan dengan penelitian yaitu Kesadaran Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Pada Tahun 2017 berdasarkan indikator operasional variabel pada kesadaran politik dan partisipasi politik.

Untuk mengukur tinggi rendahnya kesadaran politik individu, maka diperlukan indikator yang dapat digunakan sebagai patokan atau acuan pengukuran. Menurut Soekanto (Hidayat, 2016) terdapat beberapa indikator kesadaran politik yaitu; pengetahuan, pemahaman dan pola perilaku.

1. Pengetahuan Mengenai Politik

Sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto (Hidayat, 2016), indikator pengetahuan mengenai politik untuk mengukur tingkat kesadaran politik masyarakat Desa Eelahaji dalam pilkades 2017 berkaitan dengan pengetahuan masyarakat akan tujuan dari ikut

berpartisipasi politik, mengetahui tujuan dari diselenggarakannya pemilu dan mengetahui peraturan tentang pelaksanaan pemilu.

Kesadaran politik pemilih merupakan titik utama dalam menentukan pilihan mereka. Hal ini jelas menyangkut dengan pengetahuan para pemilih yang mana dalam hal kesadaran politik seperti yang penulis dapati pada wawancara salah satu peserta pemilih. Selaku pemilih mereka kurang dibekali dalam hal pengetahuan yang mana masih minimnya sosialisasi yang dilakukan di daerah tersebut. Masih kurang pengetahuan akan mempengaruhi mereka dalam menentukan pilihannya nantinya.

Desa Eelahaji banyak sekali para pemilih yang didapati terutama mereka hanya sekedar ikut-ikutan dan hanya asal dalam mencoblos ataupun memilih tidak berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka berhak mengetahui bagaimana mereka ini menentukan pilihannya tersebut dan kenapa mereka ini ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum Kepala Desa tersebut.

Hal ini sesuai dengan studi dokumentasi peneliti yang menemukan jumlah pemilih pada tahun 2017 yang lalu banyak masyarakat yang memiliki suara sah artinya bahwa masyarakat khususnya di desa Eelahaji banyak yang berpartisipasi walaupun kebanyakan masyarakat belum paham akan pentingnya berpolitik tetapi kalau ada pemilihan kepala desa masyarakat tetap aktif walaupun sebagian besar masyarakat hanya ikut ikutan saja dan belum memahami dengan pentingnya pemilihan kepala desa.

2. Pemahaman Tentang Politik

Berdasarkan penjelasan Soekanto (Hidayat, 2016), pemahaman tentang politik ini berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang betapa pentingnya ikut serta atau berpartisipasi politik, paham akan nilai-nilai demokrasi dalam pemilu, dan paham bahwa politik akan menjadi pemersatu masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari segi pemahaman masyarakat akan pentingnya berpolitik khususnya dalam pemilihan kepala desa Eelahaji, masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya dalam berpolitik sebagian besar hanya mengikuti masyarakat yang lainsaja sebenarnya mereka tidak paham atau pemahamannya tentang politik masih kurang.

Kesadaran politik pemilih pemula disini dikaitkan kepada indicator pemahaman yang mana disini kita bisa kategorikan dalam memahami pentingnya pemilihan umum bupati di desa bintang buyu. Dalam hal ini pemahaman pemilih pemula dilihat dari hal tersebut dianggap penting karena dapat dikategorikan dalam hal hubungannya dengan pilihannya nanti dapat memberikan efek ataupun sebuah dampak yang diharapkan bisa berhasil dalam konteks memajukan desa di bintang buyu itu sendiri. Suara yang diberikan oleh pemilih pemula dapat membantu memberikan dampak yang cukup pada perolehan akhir perhitungan suara. Oleh karena itu, para pemilih pemula harus perlu memahami

pentingnya mereka dalam ikut berpartisipasi didalam pemilihan umum tersebut. Di Desa Eelahaji kesadaran politik pemilih dilihat dari tingkat pemahaman masuk pada keterkaitan wawancara dibawah yakni yang mana ia memahami setidaknya untuk tidak golput dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum Kepala Desa yang diselenggarakan pada tahun 2017.

Masyarakat di desa Eelahaji masih banyak yang belum mengetahui akan pentingnya berpolitik kebanyakan masyarakat hanya mengikuti masyarakat yang lain tetapi kalau ada kegiatan yang berhubungan dengan politik mereka senang dan ikut berpartisipasi misalnya seperti pemilihan kepala desa yang lalu kenyataan banyak masyarakat memilih dibandingkan masyarakat yang tidak memilih (golput). Selain itu, faktor kekeluargaan terhadap pasangan calon Kepala Desa yang ada masih menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat pada umumnya dalam menentukan pilihan mereka.

3. Sikap Terhadap Fenomena Politik

Soekanto (Hidayat, 2016), menjelaskan sikap yang dimaksud disini merupakan kesediaan atau kesiapan masyarakat untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab tentang kegiatan berpolitik seperti sikap menolak uang suap dalam pemilu, sikap menjaga kejujuran pada saat pemilu dan sikap percaya terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan Pengawas pemilu. Sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek sosial. Dan merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek.

Menurut Leo Agustino dalam Elwan (2019) bahwa perlu di ketahui kontrol terhadap partisipasi politik (Mobilisasi yang berlebihan) dalam pilkada hanya akan menyebabkan krisis partisipasi politik (Myron Weiner), sehingga yang terjadi adalah irasional perilaku politik masyarakat. Selain disebabkan oleh kontrol yang dilakukan oleh aparat pemerintah hal lain yang menyebabkan irasionalnya kran-kran pendidikan politik masyarakat adalah di tutupnya kran-kran pendidikan politik yang seharusnya di perankan secara optimal oleh Organisasi non pemerintahan serta pencedraan demokrasi melalui perilaku elit yang tidak demokratis. Perilaku elit politik yang tidak demokratis dapat berupa : pemberian suara (money politics), Paksaan terhadap organisasi massa, keberpihakan pada salah satu pasangan calon dan memanfaatkan ghost votes, (Ode & Elwan, 2019)

Di desa Eelahaji kesadaran politik pemilih dilihat dari sikap yakni diartikan sebagai sebuah respon yang mana dalam hal ini dikaitkan dengan adanya ikut serta dalam berperan aktif dalam pemilihan umum Kepala Desa tahun 2017 ini di desa Eelahaji. Selain itu juga apakah masyarakat pemilih ini memiliki respon yang aktif sehingga mereka ikut dalam kegiatan persiapan dalam menjelang pemilihan umum tersebut. Sikap masyarakat dengan adanya pemilihan kepala desa Eelahaji terbilang baik karena masyarakat antusias dalam menyambut pemilihan umum kepala desa tersebut walaupun pengetahuan mereka tentang politik masih kurang.

Didesa Eelahaji kesadaran politik masyarakat pemilih dilihat dari sikap yakni diartikan sebagai sebuah respon yang mana dalam hal ini dikaitkan dengan adanya ikut serta dalam berperan aktif dalam pemilihan umum Kepala Desa tahun 2017 ini di desa Eelahaji. Selain itu juga apakah masyarakat pemilih ini memiliki respon yang aktif sehingga mereka ikut dalam kegiatan persiapan dalam menjelang pemilihan umum tersebut.

Selain itu, para panitia tersebut menyebutkan adanya permasalahan yang masih terus terjadi dikalangan masyarakat Desa Eelahaji ketika pemilihan umum Kepala Desa sedang berlangsung, yakni terkait dengan adanya aktivitas *Money Politic*. Adanya praktik *Money Politic* ditengah-tengah proses pemilihan kepala desa Eelahaji. Dimana bagi masyarakat, fenomena tersebut sudah menjadi hal yang lumrah terjadi setiap tahun pemilu.

4. Pola Perilaku (Tindakan) Terhadap Situasi Politik

Berdasarkan penjelasan Soekanto (Hidayat, 2016), pola perilaku yang dimaksud disini merupakan sesuatu yang dilakukan atau perbuatan mengenai kegiatan berpartisipasi politik seperti datang ke lokasi TPS untuk memberikan hak suara, ikut berkampanye, dan mencari informasi-informasi politik. Berikut peneliti memaparkan hasil wawancara dilapangan baik kepada pihak panitia maupun masyarakat lokal Desa Eelahaji:

Tindakan (perilaku) disini dapat dikatakan sesuatu yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan yang berkaitan dengan kesadaran politik masyarakat. Tindakan masyarakat pemilih dalam hal ini juga dapat dikaitkan dengan beberapa wawancara yang penulis lakukan dapat kita lihat bahwa sebagian besar Perilaku masyarakat pemilih di Desa Eelahaji dalam menentukan pilihannya pada pemilu Kepala desa tahun 2017 dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tempat tinggal sangat mempengaruhi untuk menentukan pilihannya. Karena masyarakat atau pemilih pemula yang ada di Desa Eelahaji melihat orangtua memilih calon kandidat maka mereka pun ikut-ikutan memilih apa yang dipilih oleh orangtuanya. Dalam hal ini faktor lingkungan sangat mempengaruhi pemilih pemula. Selain itu juga Pemilih pemula yang ada di Desa Eelahaji juga dipengaruhi oleh karena faktor penilaian terhadap parpol dan Dalam hal ini dimana pemilih pemula menentukan pilihannya berdasarkan orang yang mereka kenal dan orang yang berkepribadian baik serta mempunyai sikap yang baik. Pemilih pemula yang ada di Desa Eelahaji juga dipengaruhi oleh factor money politic karena sebagian besar masyarakat di sana lebih memilih calon kandidat karena sistem kekeluargaan dan money politik yang lebih berpengaruh yaitu sistem keluargaan.

Pola perilaku masyarakat pada pemilihan kepala desa cenderung antusias dalam melaksanakan pemilihan umum Kepala desa tersebut. Selain itu, juga terdapat fenomena polarisasi ditengah masyarakat Desa Eelahaji selama penyelenggaraan pilkades. Dimana

dengan jelas dan terang-terangan masyarakat berbondong-bondong hadir dalam acara perkumpulan pendukung calon Kades pada masing-masing lokasi posko.

Adanya fenomena polarisasi ditengah masyarakat Desa Eelahaji semasa pemilihan umum kepala desa dilaksanakan. Dari hasil penelitian diatas juga menunjukan pola perilaku (tindakan) banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemilihan kepala desa pada tahun 2017 yang lalu masyarakat senang dengan adanya pemilihan tersebut.

Sikap atau pola perilaku masyarakat desa Eelahaji kebanyakan masyarakat senang dengan adanya pemilihan kepala desa serta mengikuti segala arahan pemerintah dan mengikuti segala kegiatan yang berhubungan dengan pemilihan umum dibawah pengarah pemerintah desa hanya memang kebanyakan masyarakat belum memahami pentingnya berpolitik tetapi masyarakat hanya mengikuti masyarakat lain atau biasa disebut dengan partisipasi Mobilitas.

KESIMPULAN

Kesadaran politik dilihat dari tingkat pengetahuan di Desa Eelahaji Kecamatan Kulisusu pada Pemilihan Umum Kepala desa Tahun 2017 masih belum optimal dikarenakan di tingkat desa pula bisa dikatakan jarang sekali dalam melakukan kegiatan sosialisasi untuk warga di desa yang mana berkaitan dengan pemilihan umum ini. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut para pemilih pemula memerlukan pengetahuan tentang tata cara memilih, pentingnya memilih, serta tujuan dalam memilih itu seperti apa agar mereka tidak hanya sekedar memilih. Pada pemilihan umum Kepala Desa Tahun 2017 ini pemilih hanya sekekedar memberikan hak pilih tanpa tau tujuan memilih dan apa dampak kedepanya yang akan terjadi.

Kesadaran politik Masyarakat pemilih di Desa Eelahaji, masih perlu di tingkatkan dalam indikator pengetahuan Masyarakat pemilih masih belum banyak mengetahui tentang bagaimana mereka memberikan hak suara mereka dalam pemiihan umum Kepala Desa pada tahun 2017. Pemahaman tentang hal itu masih perlu di tingkatkan lagi. Dapat dikatakan bahwa masyarakat pemilih masih belum memahami kesadaran politik, di tingkatkan selanjutnya para masyarakat pemilih memiliki cukup sikap kesadaran politik, lalu dilihat dari tindakan(perilaku) disini masih kurang dalam mempunyai tindakan dalam kesadaran politik. Dalam beberapa indicator tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat pemilih masih belum memiliki kesadaran politik yang baik dan benar dari pengetahuan,pemahaman, dan pola perilaku.

REFERENSI

- Almond, Gabriel A. And G Bingham, Jr, 1976. *Comparative Politics: A Develomental Approach*. Ne Delhi, Oxford and IBH Publishing Co.
- Burhan Bungin.2003. *Penelitian Kualitatif*.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Charles Tilly, 2004, *Social Movements 1768-2004* (London : Paradigma Publisher.
- Giddens, Anthony. 1999. *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif Nurcholis,2011. *Pertumnthan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 69.Jakarta.
- Huntington P. Samuel, 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hidayat, Taufik. 2016. *Pengaruh Status Sosial Ekonomi dan Kesadaran Politik terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Legislatif (pileg) Tahun 2014 Dikelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda*. Jurnal Pemerintah Integratif Vol.4. no. 4 Tahun 2016.
- Jeffrey I. 1999. *Local Goverment, Fiscal Autonomy and Fiscal Stress: The case of California*. Working Papers, Lincoln Institute of Land Policy.
- Karp,Jeffrey A.; Banducci, Susan A.;Bowle, Shaun, 2007. *Getting Out the vote. Party Mobilization in a comparative Perspective*,Cambridge: Cambridge University Press.
- Leo Agustina. 2009, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yoyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ode, L., & Elwan, M. (2019). *MODEL DAN DAMPAK MOBILISASI POLITIK PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus: Desa Bontomatinggi Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Tahun 2016)* Oleh. 1(4), 1–17. Retrieved from <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO>
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 23/ 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bening, Yogyakarta.
- Arsip Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Eelahaji 2017
- Arsip Pemerintah Desa Eelahaji 2016
- Widjaja, HAW, 2008. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta.